

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Situasi dan situasi lingkungan internasional sejak 1990-an benar-benar berbeda dari awal abad ke-20. Pada tahun 1990-an, kancah politik internasional penuh dengan perubahan, baik dari sisi kompleksitas persoalan, aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional, maupun konteks hubungan antar negara. Berakhirnya Perang Dingin (*ideological war*) mengubah pola hubungan antar bangsa. Hubungan antar negara tidak lagi terpolarisasi antara kubu komunis yang dipimpin Soviet dan kubu non-komunis yang dipimpin AS. Ideologi tidak lagi menjadi ukuran hubungan antar bangsa. Berkurangnya peran ideologi dalam kancah politik antarnegara telah mengantarkan pada era pola hubungan internasional yang mengutamakan kerjasama dan menempatkan negara dalam situasi saling ketergantungan yang semakin meningkat. (Windiani, 2010)

Arus perpindahan masyarakat, finansial, barang, jasa, budaya, dan informasi lintas batas telah mengubah dunia secara mendasar. Fenomena ini dikenal sebagai globalisasi. Globalisasi merupakan topik hangat yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Banyak yang telah dikatakan tentang gagasan globalisasi itu sendiri. Menurut David Held, globalisasi terdiri dari akumulasi koneksi di semua wilayah di dunia dan di banyak bidang kegiatan. (Hamonangan, 2020)

Globalisasi bukanlah proses tunggal tetapi melibatkan empat jenis perubahan. Pertama, aktivitas sosial, politik, dan ekonomi kini menjangkau batas-batas politik, wilayah, dan benua berkat globalisasi. Kedua, seiring dengan meningkatnya arus perdagangan,

investasi, keuangan, imigrasi, dan budaya di bawah globalisasi, demikian pula saling ketergantungan. Ketiga, transportasi dan komunikasi baru sistem yang mempercepat pergerakan ide, barang, informasi, modal, dan manusia mempercepat globalisasi. Keempat, karena globalisasi, hal-hal yang terjadi jauh memiliki dampak yang lebih besar pada kehidupan kita. Bahkan perubahan lokal terkecil pun dapat memiliki pengaruh global yang signifikan. dampaknya. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih antara urusan dalam negeri dan luar negeri. (Hamonangan, 2020)

Kerjasama ekonomi terkait erat dengan kerjasama antar bangsa di era globalisasi ini. Kebutuhan setiap bangsa berbeda dan terus berkembang, dan saling ketergantungan antar bangsa juga tumbuh. Karena saling ketergantungan yang semakin besar, bangsa-bangsa ini perlu bekerja sama untuk menciptakan peluang ekonomi sehingga modal asing dapat masuk untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang dibutuhkannya atau memenuhi kebutuhannya sendiri semakin terlihat dengan semakin tingginya impornya. Akibatnya, kerjasama internasional menjadi sangat penting. (Ichsan, 2021)

Proses globalisasi telah memudahkan negara-negara untuk bekerjasama, dan tidak mungkin bagi negara mana pun untuk mengabaikan proses tersebut. Globalisasi berdampak pada banyak bidang kehidupan yang berbeda. Globalisasi berdampak pada semua kelas sosial. Globalisasi juga mempengaruhi bidang telekomunikasi, industri, sosial budaya, dan pendidikan. (Ichsan, 2021)

Meningkatnya globalisasi menciptakan ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Ada perbedaan pendapatan perkapita antara negara maju dan negara berkembang. Diharapkan kerjasama bilateral yang terjalin antar negara dapat mengurangi disparitas tersebut. (Ichsan, 2021)

Salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang paling umum adalah bantuan pembangunan. Pemindahan sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain umumnya disebut sebagai "bantuan luar negeri." Uang atau barang dapat berfungsi sebagai bentuknya. (Perwita & Yani, 2017)

Bantuan kepada negara berkembang dan miskin dapat datang tidak hanya melalui *Official Development Assistance* (ODA), tetapi juga dalam bentuk kerjasama perdagangan dan investasi. Ini dicapai dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA). (Atmawinata et al., 2007)

Jepang adalah salah satu negara maju di benua Asia, berkeinginan untuk bekerja sama di segala bidang dan membangun hubungan baik. Hal ini akan menjadikan Indonesia memandang Jepang sebagai mitra penting dalam upaya memajukan kepentingan nasionalnya. Pemerintah Indonesia pertama kali menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang, dan kerjasama ini disingkat IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). (Ichsan, 2021)

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang direkomendasikan menyusul kesepakatan November 2004 antara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe tentang kemungkinan pembangunan ekonomi di luar Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pada Desember 2004, dilanjutkan oleh Mendag kedua negara sebagai langkah awal dengan *Joint Study Group* (JSG). Hasil JSG merekomendasikan implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dalam enam putaran negosiasi dari Juli 2005 hingga November 2006.

Hingga tahun 2022, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik selama 64 tahun. Bantuan dan kerjasama, termasuk kemitraan, merupakan dasar dari hubungan

diplomatik. Kemitraan adalah salah satu yang dilakukan oleh individu, kelompok, bisnis, atau negara sebagai aktor. *Official Development Assistance (ODA)* adalah salah satu bentuk bantuan berwujud dan tidak berwujud yang diberikan oleh kemitraan ini. Selain itu, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* merupakan kemitraan baru antara Indonesia dan Jepang.

Hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Jepang sejak tahun 1958 semakin diperkuat dengan adanya IJEPA. Perjanjian kerjasama tahun 2007 antara Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia (SBY) , mencerminkan kemitraan ini. (Wicaksana, 2016)

Setelah kerjasama ekonomi regional Indonesia sebelumnya dengan China dan Korea Selatan, IJEPA merupakan kerjasama bilateral pertama antara kedua negara sebagai bagian dari ASEAN. Dalam hal perjanjian tersebut hanya merupakan awal dari akses pasar atau aliansi internasional. Sedikit berbeda dari FTA Jepang++, yang menawarkan lebih banyak kerjasama daripada FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas). (Atmawinata, 2007)

Menurut Kantor Penelitian, Kebijakan dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, perjanjian kemitraan ekonomi adalah "suatu bentuk kerja sama ekonomi yang lebih dari sekadar perdagangan komoditas. Pariwisata, jasa dan investasi, tetapi juga pengembangan kapasitas, usaha patungan, perjanjian investasi, dan sumber daya manusia. EPA adalah bentuk kerjasama yang lebih luas daripada perjanjian perdagangan bebas. Bersama dengan operasi perdagangan bebas, kerja sama Indonesia dan Jepang merupakan bentuk liberalisasi perdagangan yang memungkinkan efisiensi yang lebih besar. Hal ini memiliki keunggulan seperti arus perdagangan dan investasi yang lebih mudah, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi investasi dan kesejahteraan konsumen. (Ichsan, 2021)

Pemerintah Indonesia tertarik menjalin kemitraan karena salah satu poin pembahasan

IJEPA adalah kerja sama di industri otomotif semakin meningkat. Hal ini muncul dari berbagai pertemuan antara Jepang dan Indonesia saat membahas butir-butir rencana kerjasama IJEPA. Indonesia pernah memiliki industri mobil, namun transisi politik dari orde lama ke orde baru mengakibatkan sejumlah kendala dan kontradiksi dalam kebijakan yang mengatur industri mobil. (Wicaksana, 2016)

Diakui secara luas bahwa kedua negara ini memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda dalam perjanjian kerja sama ini. Ketika satu pihak menang dan pihak lain kalah, ini adalah situasi menang-kalah di mana kelangsungan jangka panjang kerja sama dapat terancam. Kerja sama IJEPA harus didasarkan pada tiga pilar untuk mencapai manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak: berdasarkan satu pilar: liberalisasi (akses ke pasar), fasilitasi (akses pasar yang mudah), dan kerjasama (kerjasama untuk pengembangan kapasitas). (Atmawinata et al., 2007)

Tentu akan ada tindak lanjut dari kedua negara untuk bisa mendorong poin-poin tersebut. Salah satu poin yang penulis bahas adalah kolaborasi. Dalam program kerja sama tersebut, Jepang sepakat untuk memberikan dukungan dengan meningkatkan kapasitas industri Indonesia. IJEPA memiliki dua lembaga yang membantu mewujudkan kerjasama: Pusat Pengembangan Industri Manufaktur (MIDEC) dan New MIDEC.

Dengan adanya program MIDEC dan New MIDEC diharapkan dapat membantu Indonesia dalam bidang industri otomotif agar lebih kompetitif dan lebih maju lagi serta memiliki kemandirian dalam sektor ini tanpa perlu campur tangan pihak luar.

Industri manufaktur yang mendominasi di Indonesia adalah industri otomotif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan multinasional Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Selain investasi, Indonesia mengimpor produk terkait mobil langsung dari Jepang, memproduksinya di Indonesia, dan mengekspornya kembali ke luar negeri. Dalam

implementasi IJEPA, liberalisasi akses pasar dimasukkan ke dalam *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). Ini merupakan pembebasan dari biaya masuk yang dikenakan pemerintah atas impor bahan baku untuk pengembangan sektor mobil, elektronik, mesin berat dan energi. Termasuk industri pendukung.

Posisi Jepang sebagai negara otomotif terkemuka memiliki dampak yang signifikan bagi negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat yang maju. Jepang merupakan perwakilan yang kuat dari negara-negara Asia karena kekuatan industrinya. Sebaliknya, kehadiran Jepang di Indonesia berfungsi sebagai pendukung sekaligus mitra kerja sama dan investasi. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan investasi Indonesia. (Novira, 2017)

Dengan adanya program MIDEK dan New MIDEK diharapkan dapat membantu Indonesia dalam bidang industri otomotif agar lebih kompetitif dan lebih maju lagi serta memiliki kemandirian dalam sektor ini tanpa perlu campur tangan pihak luar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis berhasil merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi IJEPA di bidang industri otomotif?
2. Bagaimana perkembangan industri otomotif di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh IJEPA dalam perkembangan industri otomotif di Indonesia?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan di dalam penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, lebih mendalam dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasi masalah hanya meneliti kurun waktu 2019-2021 mengenai *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan hanya menekankan pada program MIDEK dan New MIDEK

serta dampaknya terhadap bidang perdagangan yang spesifik hanya pada ekspor dan impor kendaraan roda empat *Completely Build Up* (CBU) atau kendaraan utuh, bidang Investasi dan bidang ketenagakerjaan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tingkat lanjut dari identifikasi masalah perumusan masalah dalam penyusunan skripsi dimaksud agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Adapun perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap industri otomotif di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang terangkum dalam *Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement* (IJEPA) di bidang industri otomotif.
2. Mengetahui perkembangan industri otomotif di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh implementasi IJEPA dalam sektor industri otomotif Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pembendaharaan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, khususnya yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian.
2. Sebagai tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.